

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian dunia telah mengalami globalisasi dan pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, berbagai hambatan akan terjadi seperti kegiatan berbisnis yang akan mengalami penurunan dan bahkan akan mengalami kerugian. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional, seperti pinjaman luar negeri yang mempunyai bunga yang sangat tinggi.

Investasi merupakan faktor penting yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau rendah. Investasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan negara karena investasi mendorong negara untuk menciptakan produksi dalam memenuhi urusan negara dan kesejahteraan bangsa. Kebijakan investasi juga mempunyai peran positif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan investasi atau penanaman modal bisa menjadi dasar ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil, salah satu sumber dana dalam pembangunan ekonomi nasional negara adalah dengan mengundang investor (penanam modal) terutama investor asing agar bersedia menanamkan modalnya. Dalam konteks makroekonomi, investasi memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah (Masri 2022).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah seala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan investasi (penanam modal) dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu investasi fisik dan investasi finansial.

Menurut Fatimah, Amalia, & Panggiarti (2022), Penanaman Modal Asing dipandang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya hutang luar negeri. Pemberian hutang luar negeri secara faktual ditempatkan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, meskipun secara normatif harus ditempatkan sebagai sumber tambahan. Masuknya modal asing pada suatu negara mengakibatkan perluasan lapangan kerja, alih teknologi, pengembangan teknologi substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non migas untuk mendatangkan devisa, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat membangun daerah tertinggal (Siburian, Apriyanto and Sinaga 2022).

Kabupaten dan kota di Indonesia diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan kekayaannya dengan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki wilayah masing-masing. Otonomi daerah juga menempatkan kabupaten dan kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Investasi merupakan pedoman utama pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu setiap daerah telah merancang berbagai penawaran tentang potensi daerah kepada calon investor untuk menanamkan modal di daerahnya. Dengan demikian peran pemerintah daerah menjadi sangat penting bagi masuknya investasi ke Indonesia.

Sebagai upaya untuk membangun perekonomian melalui pemulihan iklim investasi yang menarik dan kondusif agar dapat mengajak calon investor untuk menanamkan modalnya, pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan dalam “paket reformasi kebijaksanaan investasi”, salah satunya melimpahkan wewenang pemberian persetujuan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan.

Namun pada tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru dinamakan *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Adanya peristiwa pandemi Covid-19 ini bukan hanya memberikan ancaman kepada kesehatan saja akan tetapi juga pada pertumbuhan perekonomian di suatu negara (Elga, Murni and Tulung 2022). Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 yang telah merebak di Indonesia khususnya di Kabupaten Bengkalis dirasakan di berbagai sektor. Mulai dari turunnya aktivitas ekonomi di sektor mikro, maupun belanja pembangunan pemerintah daerah dan melemahnya sektor investasi. Dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini dirasakan hampir di seluruh sektor. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis sebagai institusi pemerintah turut melakukan upaya-upaya untuk menjaga iklim investasi salah satunya adalah mempermudah proses perizinan usaha terutama bagi bisnis di sektor kesehatan, hal ini dilakukan untuk merespon pesatnya minat pelaku usaha yang tinggi dalam pengajuan izin kesehatan di masa pandemi ini.

Berdasarkan tribunsatu.(2020), Kabupaten Bengkalis berada pada posisi ketiga diprovinsi Riau sebesar Rp 2.072 Triliun setelah Kabupaten Pelalawan Rp 2.200 Triliun, Kota Dumai Rp 2.153 Triliun. Hal ini menjadi salah satu hal positif dikala perekonomian yang menurun karena pandemi Covid-19. Basuki selaku Kepala Dinas DPMPTSP mengatakan bahwa kemudahan adalah prioritas utama. Meski empat tahun terakhir promosi dikurangi, namun promosi tetap kita maksimalkan. Dan dengan pelayanan online semakin memudahkan investor berinvestasi. Investasi terbesar ada pada sektor industri turunan produk kelapa sawit. Ini merupakan bentuk kelanjutan *joint venture* atas pengembangan produk-produk baru kelapa sawit. Selain itu, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Isentif dan Kemudahan Investasi di Daerah juga menjadi penunjang kemudahan dan minat melakukan investasi di daerah.

Menurut Bagus Santoso (bengkaliskab.go.id), secara geografis Kabupaten Bengkalis merupakan kawasan yang sangat strategis berada di lintasan jalur Selat Malaka dan lintasan Sumatera. Ini merupakan peluang besar bagi para pemilik

modal untuk berinvestasi di Kabupaten Bengkulu. Disamping berbagai kemudahan yang disiapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu untuk melakukan Investasi di Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana peluang investasi PMDN dan PMA di daerah Kabupaten Bengkulu pada tahun 2018-2022 dan faktor yang mempengaruhi investasi di daerah Kabupaten Bengkulu serta kendala dan upaya dalam investasi di daerah Kabupaten Bengkulu. Maka dari itu penulis memilih judul "**Analisis Peluang Investasi Di Daerah Kabupaten Bengkulu**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peluang investasi di daerah Kabupaten Bengkulu pada tahun 2018-2022?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di daerah Kabupaten Bengkulu pada tahun 2018-2022?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam investasi di daerah Kabupaten Bengkulu tahun pada 2018-2022?
4. Apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan investasi di daerah Kabupaten Bengkulu pada tahun 2018-2022?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar lebih fokus pada pokok pembahasan, maupun suatu analisa yang berbobot dan baik, serta tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian. Peneliti membatasi objek penelitian yang hanya fokus pada peluang investasi PMDN dan PMA di daerah Kabupaten Bengkulu pada tahun 2018 – 2022 serta apa kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan investasi PMDN dan PMA di daerah Kabupaten Bengkulu.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peluang investasi di daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi investasi di daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam investasi di daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan investasi di daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan kemampuan untuk menganalisis investasi daerah serta menjadi sarana dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan.
2. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam menentukan keputusan strategis yang berhubungan dengan investasi daerah.
3. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi bahan referensi di bidang akuntansi kepada peneliti selanjutnya, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan investasi daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan penelitian, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab, adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi pemerintah atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN